

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara di seluruh dunia melakukan pembangunan ekonomi. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional suatu perekonomian dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan sosial.¹ Menurut Nurhadi dan Yuliana, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan mempertimbangkan pendapatan perkapita sebuah negara.² Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam periode tertentu. pendapatan perkapita ini diukur dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk pada sebuah negara. Dari dua penjabaran di atas mengenai pembangunan ekonomi kita memahami pentingnya pendapatan nasional sebuah negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pendapatan nasional, investasi sangat penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui investasi terjadi karena modal tambahan yang didapat melalui investasi

¹ Nurhadi dan Yulianan Sudremi, *Lensa Kegiatan Ekonomi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), p. 3

² Nurhadi dan Yulianan Sudremi, *op. cit*, p. 8.

dialokasikan untuk meningkatkan faktor-faktor produksi. Meningkatnya faktor-faktor produksi akan meningkatkan hasil produksi baik barang maupun jasa. Selain itu, investasi juga akan menyerap banyak tenaga kerja, menambah devisa, mengembangkan industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, negara memiliki tanggung jawab untuk menghimpun modal. Tanggung jawab pemerintah tersebut di implementasikan dengan berupaya mencari sumber pembiayaan dari berbagai sektor. Sumber pembiayaan ini berupa investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi luar negeri dibutuhkan karena negara belum mampu untuk mencukupi kebutuhan dana dalam negerinya apabila hanya mengandalkan investasi domestik. Hal yang membedakan antara investasi di negara berkembang dan di negara maju adalah besaran investasi yang dibutuhkan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi. Negara berkembang membutuhkan modal investasi yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi dari negara maju. Bagi negara berkembang investasi asing menjadi solusi untuk mendapatkan modal dengan jumlah besar dalam rangka melaksanakan pembangunan. Bagi negara maju, investasi asing berperan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Salah satu hal yang ingin dicapai melalui investasi oleh negara berkembang adalah menciptakan industri substitusi impor yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan menghasilkan produk yang berorientasi pada ekspor. Selain itu, melalui

investasi negara berkembang juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan industrinya dari berbagai sektor baik sektor primer, sekunder, dan tersier.

Besarnya kebutuhan akan pengembangan ke tiga sektor tersebut bagi negara-negara ASEAN, membuat negara-negara anggota ASEAN yang mayoritas anggotanya adalah negara berkembang berlomba untuk mengundang investor asing untuk ikut menanamkan modalnya di ASEAN. Investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) adalah aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang dialokasikan untuk sektor swasta baik melalui Investasi Asing Langsung atau FDI (*Foreign Direct Investment*) maupun investasi tidak langsung berupa portofolio. Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, Penanaman Modal Swasta Asing secara langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) merupakan dana-dana investasi yang langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya. Sedangkan investasi tidak langsung (portofolio) merupakan investasi di pasar modal dan pasar uang. Investasi tidak langsung ini bersifat jangka pendek.

Bagi negara berkembang, investasi asing langsung dianggap lebih menarik untuk mendorong pembangunan di negara tersebut. Hal ini terjadi karena melalui investasi langsung akan terjadi alih teknologi, *transfer* manajemen dari luar negeri dan penyerapan banyak tenaga kerja dalam negeri. Selain itu, melalui investasi

asing langsung akan meningkatkan pendapatan nasional suatu negara melalui peningkatan hasil dan nilai tambah produksi.

Banyak faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung di sebuah negara. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kondisi internal perusahaan itu sendiri dan kondisi negara penerima investasi. Pada umumnya calon investor akan mempertimbangkan untuk berinvestasi pada sebuah negara berdasarkan tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek non ekonomi, dan aspek pemerintahan yang ada pada negara penerima investasi. Selain itu investor juga akan menentukan sektor mana yang menarik untuk diinvestasikan. Berikut adalah tabel jumlah investasi asing langsung yang mengalir di negara-negara ASEAN pada tahun 2014.

Tabel I.1

Jumlah FDI di negara-negara ASEAN 2014

Country	2014 p/		
	Intra-ASEAN	Extra-ASEAN	Total net inflow
Brunei Darussalam	141.2	427.0	568.2
Cambodia	372.5	1,354.0	1,726.5
Indonesia	13,458.8	8,817.5	22,276.3
Lao PDR	137.9	775.3	913.2
Malaysia	2,771.1	7,943.0	10,714.0
Myanmar	683.6	262.6	946.2
Philippines	78.6	6,121.9	6,200.5
Singapore	4,532.7	67,565.6	72,098.3
Thailand	653.9	10,884.0	11,537.9
Viet Nam	1,547.1	7,653.0	9,200.1
Total	24,377.4	111,803.9	136,181.4

Sumber: www.asean.org

Data tahun 2014 menunjukkan bahwa aliran dana investasi asing langsung di Indonesia cukup rendah apabila dibandingkan dengan Singapura. Singapura masih menjadi negara penerima aliran dana FDI terbesar di ASEAN dengan sekitar US\$ 72 juta. Nilai ini jauh di atas Indonesia yang hanya menerima US\$ 23 juta. Sementara negara-negara besar ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand menerima investasi asing langsung di kisaran 9, 10, dan 11 juta dollar Amerika.

Rendahnya investasi asing langsung di beberapa negara ASEAN secara umum banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor ekonomi, non ekonomi, dan kebijakan pemerintah terhadap kegiatan investasi. ketiga faktor ini menjadi pertimbangan dalam berinvestasi di negara berkembang khususnya sebagian besar negara di ASEAN karena ketiga faktor tersebut sangat berkaitan dengan kelangsungan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang, keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan, ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku, daya beli masyarakat dan masih banyak lagi.

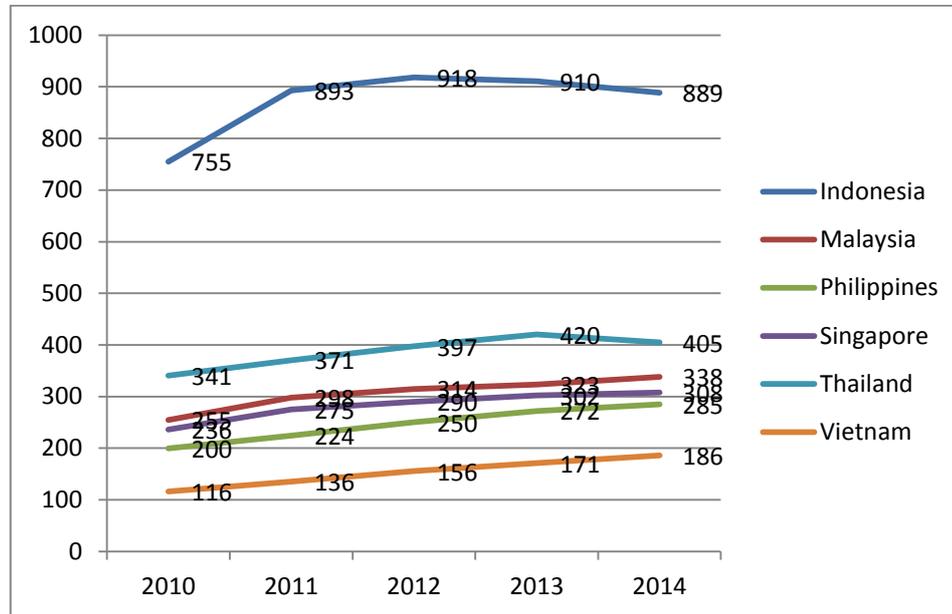
Dalam melakukan investasi, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada pada negara penerima investasi, tujuannya adalah agar investasi yang dilakukan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dengan begitu diharapkan pengembalian modal investasi bisa terjadi sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh investor. Untuk itu, investor harus mampu menganalisis berbagai faktor yang mampu untuk mempengaruhi keuntungan dan keberlanjutan investasi, baik itu faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi dari negara tujuan investasi.

Bagi investor, PDB (Produk Domestik Bruto) sebuah negara menjadi pertimbangan utama dalam memahami kondisi perekonomian suatu negara. Dengan menggunakan data yang bersumber dari PDB, investor bisa mengukur kondisi perekonomian sebuah negara. Negara dengan perekonomian yang sedang tumbuh dengan membandingkan PDB dalam beberapa periode akan sangat menarik bagi investor, karena perekonomian yang tumbuh menjanjikan pengembalian investasi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian yang *stagnant* atau bahkan menyusut. Selain itu, dengan menggunakan PDB, investor akan lebih mudah untuk menganalisis kondisi perekonomian negara yang akan diinvestasikan.

Profit sebagai salah satu komponen penyusun PDB akan memudahkan investor dalam memperkirakan dan menganalisis keuntungan yang akan didapat dalam berinvestasi. Dengan analisis tersebut investor bisa memperkirakan keuntungan dan keberlanjutan dari investasi yang dilakukan.

Untuk wilayah ASEAN, PDB terbesar pada tahun 2014 dimiliki oleh Indonesia dengan US\$ 888.54 milyar, diikuti oleh Thailand dan Malaysia masing-masing dengan US\$ 404.82 milyar dan US\$ 338.10 miliar, sementara PDB paling rendah dimiliki oleh Laos dengan total pendapatan nasional pada tahun 2014 sebesar US\$ 12.00 miliar. Sejak tahun 2005, hingga 2014 perkembangan pendapatan nasional pada negara-negara anggota ASEAN cenderung berfluktuatif. Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan pendapatan nasional dari negara Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Singapura, dan Vietnam pada tahun 2010 hingga 2014.

Gambar I.1
Grafik PDB 6 Negara ASEAN 2010-2014



Sumber: *World Bank*

Selanjutnya, faktor ekonomi yang juga mempengaruhi investasi asing langsung adalah suku bunga yang berlaku. Hal ini terjadi karena suku bunga sangat erat kaitanya dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Melalui kebijakan moneter, pemerintah menentukan suku bunga yang berlaku untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika dikaitkan dengan investasi, suku bunga memiliki hubungan yang negatif terhadap investasi. Pemilik modal memiliki pilihan untuk mendepositokan dan menabung, atau menginvestasikan uang mereka. Apabila pemilik modal memutuskan untuk menabung dan mendepositokan uang mereka, maka modal yang akan diinvestasikan akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, apabila pemilik modal memutuskan untuk berinvestasi maka jumlah uang yang akan ditabung dan didepositokan akan berkurang.

Hubungan negatif antara suku bunga dan investasi menyebabkan investor harus memilih untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga atau menginvestasikan uang mereka. Suku bunga yang tinggi menyebabkan investor lebih memilih untuk menabung dan menandatangani uang yang mereka miliki. Hal ini menjadi rasional bagi pemilik modal karena dengan suku bunga yang tinggi mereka akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, suku bunga yang rendah menyebabkan investor lebih banyak berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan.

Selain faktor ekonomi seperti pendapatan nasional dan suku bunga, ada pula faktor non-ekonomi yang digunakan oleh investor dalam mempertimbangkan investasi yang akan dilakukan. Faktor non-ekonomi ini juga menjadi dasar bagi investor dalam memperkirakan keuntungan dan keberlanjutan investasi yang dilakukan. Salah satu faktor yang membuat investor kesulitan dalam meramalkan keuntungan investasi adalah sulitnya investor dalam memperkirakan pengeluaran atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam berinvestasi. Hal ini biasanya terjadi karena banyaknya pengeluaran atau beban yang harus dibayar oleh perusahaan diluar pungutan resmi yang telah ada.

Bagi perusahaan, bertambahnya biaya dalam sebuah kegiatan produksi akan menyebabkan inefisiensi. Inefisiensi inilah yang ingin dihindari oleh perusahaan. Inefisiensi bagi perusahaan akan menyebabkan terbuangnya sumber daya secara percuma baik waktu maupun modal, menaikkan biaya, serta menurunkan keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan. Korupsi sebagai penyebab salah

satu penyebab inefisiensi akan membuat iklim investasi di sebuah negara menjadi kurang menarik bagi investor.

Korupsi bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perekonomian, Noonan dalam sebuah penelitiannya mendokumentasikan mengenai sejarah korupsi, ditemukan bahwa sejarah korupsi telah terjadi sejak zaman Roma dan Yunani kuno. Pada saat itu sebuah pos pemeriksaan dibuat untuk mengendalikan korupsi.³ Di era modern seperti saat ini korupsi lazim ditemukan di belahan dunia manapun terutama di negara-negara berkembang. Bahkan pada tahun 2005 berdasarkan survei yang dilakukan *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC), Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di Asia.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah indeks yang menggambarkan anggapan masyarakat di suatu negara atau wilayah terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Rahim M. Quanzie mengenai hubungan antara korupsi yang diukur dengan menggunakan IPK dengan *Foreign Direct Investment* di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa IPK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap FDI di kawasan Asia selatan dan ASEAN⁵. Kondisi ini menunjukkan korupsi menjadi pertimbangan yang dominan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di negara-negara ASEAN. Hal ini menjadikan korupsi memiliki hubungan yang negatif terhadap FDI.

³ Rahim M. Quazi. Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Econometric Study. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 4, No. 2, 2014, p. 232.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi (diakses 19 November 2015)

⁵ Rahim M. Quazi. *op. cit* p. 239.

IPK memiliki range 0-10, semakin mendekati 10 artinya suatu negara dapat dikatakan bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin mendekati 0 suatu negara dapat dikatakan semakin korup. Namun sejak 2012 range IPK berubah menjadi 0-100 dengan kriteria yang sama. Data tahun 2014 menunjukkan IPK Indonesia berada pada angka 34 atau masih berada pada kondisi yang masih sulit terbebas dari korupsi. Untuk wilayah ASEAN, skor IPK tersebut menunjukkan Indonesia masih berada dibawah negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Philipines. Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste, Cambodia, dan Myanmar. Meskipun pada tahun 2014 tidak ada data mengenai IPK Brunei Darussalam, IPK Brunei pada tahun 2013 berada di angka 64 atau lebih baik dibandingkan dengan Indonesia dengan skor IPK pada angka 32 ditahun yang sama. Berikut adalah tabel IPK untuk ASEAN pada tahun 2014.

Tabel I.2

Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara ASEAN 2014

Ranking	Negara	IPK 2014
7	Singapore	84
50	Malaysia	52
85	Thailand	38
85	Philipina	38
107	Indonesia	34
119	Vietnam	31
145	Laos	25
156	Cambodia	21
156	Myanmar	21
-	Brunei	N/A

Sumber: *Transparency International*

Selain korupsi, faktor lain yang juga mempengaruhi investasi adalah mengenai keberlangsungan kegiatan investasi dalam jangka panjang. Bagi investor, investasi jangka panjang akan memudahkan investor dalam melakukan perencanaan dan pengembangan dari investasi yang akan dijalankan. Untuk mengembangkan investasi dalam jangka panjang tersebut, investor membutuhkan kepastian dari lingkungan investasi yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan bisnis. Lingkungan investasi yang kondusif akan didapatkan oleh investor apabila resiko-resiko negatif yang mampu memberikan pengaruh buruk bagi keuntungan dan keberlanjutan kegiatan investasi bisa diminimalkan.

Salah satu faktor yang bisa menciptakan lingkungan investasi yang kondusif adalah dengan kestabilan politik sebuah negara. Ketidakstabilan politik di sebuah negara akan membuat resiko politik dari negara tersebut menjadi semakin besar. Resiko politik yang besar akan menciptakan lingkungan investasi menjadi kurang kondusif. Hal ini tentu akan berdampak terhadap keraguan investor untuk berinvestasi karena besarnya resiko belum tentu sebanding dengan keuntungan yang akan didapatkan. Ketidakstabilan politik pada umumnya terkait dengan masalah kekuasaan pada sebuah negara.

Masalah kekuasaan yang terjadi akibat ketidakstabilan politik bisa sangat merugikan investor. Hal ini terjadi karena dengan ketidakstabilan politik bisa mengakibatkan berubahnya regulasi pada sebuah negara yang merugikan bagi investor. Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsry, ketidakstabilan politik juga bisa berdampak sangat buruk terhadap perekonomian secara umum seperti tingginya inflasi yang bisa meningkatkan angka kemiskinan. Hal inilah

yang bisa memicu kerusuhan politik dan sosial.⁶ Tentu saja kondisi tersebut sangat tidak menarik bagi investor dalam melakukan investasi.

Secara umum ketidakstabilan politik membuat investor khususnya investor asing enggan untuk berinvestasi di negara tersebut. Selain itu, negara yang berada pada situasi konflik dan perebutan kekuasaan akan ditinggalkan oleh investor yang mungkin telah berinvestasi dalam beberapa waktu tertentu. Sebagai contoh kudeta militer yang terjadi di Thailand pada tahun 2014 menyebabkan investor asing menarik dana sekitar US\$ 408 juta atau sekitar Rp 4,71 triliun (memakai asumsi kurs Rp 11.563 per dolar AS) dari negara tersebut sejak darurat militer dideklarasikan.⁷ Data FDI di Thailand pada tahun tersebut juga menunjukkan penurunan investasi asing di negara tersebut dari US\$13 miliar pada tahun 2013, menjadi US\$ 11,538 miliar pada tahun 2014. Berbeda dengan Thailand yang menghadapi kudeta, Myanmar pada tahun 2015 sedang memasuki masa transisi perpindahan kekuasaan yang sebelumnya dikusai oleh militer untuk diserahkan kepada rakyat. Transisi inilah yang menimbulkan gejolak politik karena masih adanya hak veto dari militer dalam proses demokrasi di negara tersebut. Selanjutnya Indonesia, Myanmar, dan Philippines juga memiliki masalah ketidakstabilan politik meskipun ketidakstabilan politik tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan masalah stabilitas politik yang terjadi di Thailand dan Myanmar. Pada tahun 2014 Indonesia mengalami transisi

⁶ Ichsanuddin Noorsy, *Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto*, edisi 28 Maret 2015. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/28>. (Diakses tanggal 4 februari 2015).

⁷ Agustina Melani, *Ada Kudeta Militer, Pasar Keuangan Thailand Sedikit Bergejolak*, edisi 23 Mei 2014. <http://bisnis.liputan6.com/read/2053638/ada-kudeta-militer-pasar-keuangan-thailand-sedikit-bergejolak>. (Diakses 28 28 februari 2016).

pemerintahan dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden Joko Widodo. Permasalahan justru terjadi ketika parlemen dikuasa oleh koalisi yang bertentangan dengan pemerintah. Kondisi tersebut dianggap akan menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakannya karena akan sulit untuk mendapat dukungan dari parlemen. Selanjutnya pemerintahan Malaysia lebih banyak diganggu oleh demonstrasi, permasalahan rasial, dan isu mengenai korupsi kepada perdana menteri dan Philippines akan menghadapi transisi pemerintah pada tahun 2016 yang artinya akan ada perebutan kekuasaan dan perpindahan kekuasaan dari presiden Benigno Aquino yang akan segera habis masa jabatannya. Sementara untuk negara Cambodia, ketidakstabilan politik terjadi setelah proses pemilu pada tahun 2014. Pemilu pada tahun 2014 tersebut dianggap penuh dengan kecurangan oleh oposisi. Mengutip dari *TIME.COM* Banyak tindak kekerasan dan penangkapan diluar hukum yang terjadi akibat permasalahan politik di negara tersebut.

Negara-negara di ASEAN yang sebagian besar negara berkembang merupakan negara dengan stabilitas politik yang bervariasi. Singapura sebagai satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN memiliki stabilitas politik yang sangat baik, artinya kondisi politik di Singapura sangat stabil. Stabilitas politik yang baik juga dimiliki oleh Brunei Darussalam, meskipun negara ini masih termasuk negara berkembang. Sementara beberapa negara lainnya memiliki stabilitas politik dengan kondisi medium dan rendah. Berikut adalah agregat stabilitas politik negara-negara ASEAN pada tahun 2014.

Tabel I.3**Agregat Stabilitas Politik Negara-negara ASEAN 2014**

Negara	Agregat Stabilitas Politik
Brunei Darussalam	95.1
Cambodia	17.7
Indonesia	31.1
Lao PDR	61.2
Malaysia	58.7
Myanmar	11.7
Philippines	22.8
Singapore	92.2
Thailand	16.5
Viet Nam	46.1

Sumber: *World Bank*

Berdasarkan agregat indikator yang dikeluarkan oleh *World Bank*, Singapura memiliki agregat stabilitas politik sebesar 92.2 pada tahun 2014. Agregat ini menggambarkan kondisi stabilitas politik yang sangat bagus di Singapura dimana agregat sempurna memiliki nilai 100. Kondisi politik yang sangat stabil ini mengantarkan Singapura menjadi negara penerima investasi asing langsung paling besar jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya pada tahun 2014. Hal ini tidak terlepas dari kondusifnya iklim investasi di negara tersebut karena stabilnya kondisi politik di negara tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Molaile dan Ahmadi pada tahun 2013 terhadap 138 negara yang terdiri dari 36 negara maju, 68 negara berkembang, dan 34 negara tertinggal di seluruh dunia mengenai pengaruh stabilitas politik terhadap FDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurunnya stabilitas politik akan menyebabkan berkurangnya investasi asing pada sebuah negara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi FDI di ASEAN seperti Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, indeks persepsi korupsi, dan indeks stabilitas politik. Namun, pengaruh-pengaruh tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah produk domestik bruto dan suku bunga sebagai faktor ekonomi akan mempengaruhi investor asing dalam menanamkan modal langsungnya di ASEAN. Selain itu, mengkaji pengaruh indeks persepsi korupsi dan kestabilan politik meningkatkan jumlah FDI juga harus dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh faktor non ekonomi tersebut dalam mempengaruhi FDI di kawasan ASEAN. Selanjutnya peneliti akan mencoba untuk meneliti apakah faktor ekonomi atau faktor non ekonomi yang lebih dominan dalam mempengaruhi FDI di ASEAN. Untuk itu peneliti menjadikan Investasi Asing Langsung sebagai variabel terikat dan akan diteliti dengan Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Stabilitas Politik sebagai variabel bebas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara Produk Domestik Bruto terhadap Investasi Asing Langsung?
2. Apakah ada pengaruh antara Suku Bunga terhadap Investasi Asing Langsung?
3. Apakah ada pengaruh antara Indeks Persepsi Korupsi terhadap Investasi Asing Langsung?

4. Apakah ada pengaruh antara Indeks stabilitas politik terhadap Investasi Asing Langsung?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah Investasi Asing Langsung (FDI) memiliki penyebab yang sangat luas dan kompleks. Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti bagi dari segi dana, waktu, dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Pengaruh produk domestik bruto, suku bunga, indeks persepsi korupsi dan stabilitas politik terhadap Investasi Asing Langsung di ASEAN”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan perbatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Apakah ada pengaruh antara Produk Domestik Bruto terhadap Investasi Asing Langsung?
2. Apakah ada pengaruh antara Suku Bunga terhadap Investasi Asing Langsung?
3. Apakah ada pengaruh antara Indeks Persepsi Korupsi terhadap Investasi Asing Langsung?
4. Apakah ada pengaruh antara Indeks stabilitas politik terhadap Investasi Asing Langsung?
5. Apakah ada pengaruh antara Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Stabilitas Politik dengan FDI di kawasan ASEAN?

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak pembaca, baik secara teoritis, maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perekonomian, serta sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang “Pengaruh GDP, suku bunga, indeks persepsi korupsi dan indeks kestabilan politik terhadap FDI di kawasan ASEAN”.
2. Secara praktis, diharap sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pemerintah dalam menentukan arah dan strategi untuk menentukan kebijakan investasi asing langsung di masa mendatang, serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai pentingnya kebijakan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menciptakan dan menjaga stabilitas politik.